



ABSTRAK

Hardinal. NIM. : 31594106039, Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia dan Implementasinya pada Peradilan Agama (Kajian Pemikiran Busthanul Arifin). Program Doktor Universitas Islam Negeri (UIN) Pekanbaru, Riau, 2018

Hukum Islam merupakan bagian sistem hukum di Indonesia yang telah dikenal sejak agama Islam masuk di Nusantara pada abad 1 Hijriyah dan diterima secara menyeluruh oleh umat Islam Indonesia, sebagaimana teori *Receptie in Complexu*. Pelaksanaannya berawal dari lembaga “*tahkim*”, merupakan cikal bakal peradilan agama di Indonesia. Hukum Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam merupakan sistem hukum yang hidup (hukum positif). Ketika kerajaan Mataram menguasai wilayah Jawa Tengah dengan raja Sultan Agung (1613-1645 M), penyebaran agama Islam hampir meliputi wilayah Indonesia, pada masa ini dibentuk Peradilan Islam (Peradilan Serambi). Pada tahun 1642 terbentuk “*Statuta Batavia*”, antara lain mengatur kewarisan orang-orang Indonesia yang beragama Islam harus menggunakan hukum Islam. Pada tahun 1760 dibuat “*Compendium Freijer*” yang memuat hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam. Kitab “*Mugharraer*” (dari *al-Muharrar*) yang berlaku di Pengadilan Negeri Semarang, sebagian besar isinya tentang hukum pidana Islam. Peradilan Serambi diakui secara yuridis formal sebagai Badan Peradilan Negara pertama kali pada tanggal 1 Agustus 1882, berdasarkan *Staatsblad* Nomor 153 Tahun 1882 untuk wilayah Jawa dan Madura, namun statusnya direkayasa menjadi Peradilan Quasi (Peradilan Semu) dan tidak mandiri. Ketika kerajaan Mataram Jatuh (1674 M) terpecah menjadi dua, yakni Yogyakarta dan Surakarta, pemerintah kolonial Belanda mulai mencampuri urusan kerajaan. Pemerintah Hindia Belanda mengeliminir peran dan fungsinya, berusaha menghalangi pelaksanaan hukum Islam di bumi Nusantara dan muncul *teori receptie*. Kompetensi Peradilan Serambi dibatasi hanya di bidang perkawinan tertentu. Pada masa penjajahan Jepang Peradilan Agama dipandang tidak perlu, dan hampir terhapus menjelang kemerdekaan Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia dibentuk Departemen Agama. Mulai saat itu, eksistensi dan pembinaan Peradilan Agama mendapat perhatian setelah adanya Biro Peradilan Agama sampai berwujud Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Upaya-upaya untuk menghapus Peradilan Agama pasca kemerdekaan muncul kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948 tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman dan Kejaksaan. Undang-undang ini menyatakan hanya ada tiga lingkungan peradilan yang diakui, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Tata-usaha Negara, dan Peradilan Ketentaraan.

Busthanul Arifin merupakan salah satu tokoh dan sosok penting yang dengan gigih berjuang, dan berhasil mengangkat eksistensi Peradilan Agama dan hukum Islam di Indonesia. Bagaimana pemikirannya, mengapa ia berjuang keras melembagakan hukum Islam dan mengangkat kedudukan Peradilan Agama? Bagaimana implementasi hukum Islam pada Peradilan di Indonesia?

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan, mendeskripsikan, menganalisis, dan mengkritisi pemikiran Busthanul Arifin dalam masalah tersebut. Karena ia dipandang berhasil melembagakan hukum Islam dan memperkuat eksistensi Peradilan Agama setelah melalui perjalanan panjang, berliku, dan melelahkan, dari “Peradilan Quasi” yang eksis di “serambi masjid” menjadi peradilan negara, pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia yang dapat melaksanakan putusannya sendiri.



Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif terhadap asas-asas hukum, konsepsi, doktrin dan kaidah hukum, dengan buku primer dua buah buku Busthanul Arifin tentang transformasi hukum Islam dan Pelembagaan Hukum Islam.

Penelitian disertasi ini berhasil menemukan, bahwa Busthanul Arifin berhasil meluruskan persepsi umat Islam (ulama-ulama) tentang konsep hukum Islam menjadi hukum positif yang terkodifikasi, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijadikan sebagai hukum materiil di Peradilan Agama, serta menghilangkan kesalahpahaman yang begitu tajam di kalangan masyarakat dan pakar-pakar hukum yang belum bersedia menerima dengan sepenuhnya hukum Islam dan eksistensi Peradilan Agama di Indonesia.

Pemikiran, upaya-upaya, dan kerja keras Busthanul Arifin dalam pelembagaan hukum Islam di Indonesia bersifat prospektif. Hukum Islam diorientasikan kepada pembentukan hukum nasional. Hukum Islam diposisikan sebagai sumber hukum yang utama dalam pembentukan hukum nasional. Tiga tonggak hukum harus diaktualisasikan: (1). Substansi hukum Islam, yaitu ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits Rasul yang berkenaan dengan hukum ijthadi; (2). Lembaga hukum Islam sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah Peradilan Agama; dan (3). Kesadaran hukum masyarakat akan hukum Islam. Hakikat pelembagaan hukum Islam adalah menjadikan hukum Islam itu bergeser dari hukum yang abstrak menjadi hukum yang hidup secara konkret, dalam pengertian ditransformasikan menjadi hukum positif (*the living law*) dengan berpijak pada nilai historis, sosiologis, yuridis, dan filosofis.

Atas dasar temuan penelitian disertasi ini, penulis merekomendasikan perlunya “repositivisasi hukum Islam” di Indonesia. Mengapa, karena sebagian besar atau mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam. Amanat sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjamin penduduk yang beragama Islam untuk menjalankan hukum agamanya. Dan ini sangat relevan dengan teori-teori pembentukan dan pemberlakuan hukum dalam suatu negara yang berfalsafah Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. KHI merupakan hukum materiil Pengadilan Agama yang sekarang ini statusnya berupa Instruksi Presiden, perlu segera ditingkatkan statusnya menjadi undang-undang dan dimasukkan ke Lembaran Negara, karena Peradilan Agama telah mengimplementasi KHI melalui Pengadilan Tingkat Pertama di seluruh wilayah Indonesia, dan menjadikan pasal-pasal KHI sebagai dasar hukum mengadili (putusan) dalam perkara *ahwal al-sakhsyiyah*.

Ilirareg, sebagai sumber informasi, menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRACT

Hardinal (2018), Institutionalization of Islamic Law in Indonesia and Its Implementation on Religious Courts (Study of Busthanul Arifin's Thought)

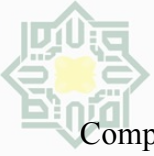
Islamic law is one of the legal systems in Indonesia that has been known since Islam entered Indonesia in the 1st century of Hijriyah and accepted as a whole by Indonesian Muslims, as *Receptive in Complex* theory. It's implementation begins from the institution of "*Tahkim*", is the embryo of religious courts in Indonesia. Islamic law in the time of the Islamic kingdoms is a living legal system (positive law). When the kingdom of Mataram controlled the area of Central Java with the king of Sultan Agung (1613-1645 AD), the spread of Islam almost covers the territory of Indonesia, at this time Islamic Court (Court of Serambi) was established. In the 1642, "Statute Batavia" was formed, among others to regulate the inheritance of Indonesian Muslims who must use Islamic law. In the 1760, "Compendium Freijer" was made. It contains marriage law and Islamic inheritance law. The book of "Mugharraer" (from al-Muharrar) prevailing in the Semarang District Court, much of it in terms of Islamic criminal law. The Court of Serambi was officially recognized as the first State Judicial Body on August 1, 1882, based on Staatsblad Number 153 of 1882 for the Javanese and Madurese territories, but its status was engineered into Quasi Courts and not independent. When the fallen of Mataram kingdom (1674 AD), it was splitted into two, namely Yogyakarta and Surakarta, the Dutch colonial government began to interfere in the affairs of the kingdom. The Dutch government eliminated its role and function, tried to block the implementation of Islamic law in Indonesia and *receptive* theory emerged. The competence of Courts of Serambi is limited only in certain areas of marriage. During the Japanese occupation, the Religious Judiciary was deemed unnecessary, and almost erased before Indonesian independence. In early Indonesian independence, the Department of Religion was established. From then on, the existence and guidance of the Religious Courts received attention after the Religious Justice Office changed into the Directorate of Islamic Religious Courts. Efforts to eradicate Religious Courts after independence reemerge with the enactment of Law Number 19 of 1948 on the Composition and Authority of Judicial and Attorney Bodies. The Law states that there are only three recognized jurisdictions, namely the General Courts, State Administration Courts and the Army Courts.

Busthanul Arifin is one of the important figures who persistently struggle, and succeeded in elevating the existence of the Religious Courts and Islamic Law in Indonesia. What is his thinking, why does he struggle to institutionalize Islamic law and elevate the position of the Religious Courts? How is the implementation of Islamic law in the Religious Courts in Indonesia?

This study aims to reveal, describe, analyze, and criticize the thoughts of Busthanul Arifin in the matter. Because he is considered successful in instituting Islamic law and strengthening the existence of the Religious Courts after a long, tortuous and exhausting journey from the Quasi Courts that exist in the "mosque hall" to the state court, the judicial executive in Indonesia who can carry out his own verdict.

The research method uses normative juridical approach towards the principles of law, conception, doctrine and rule of law, with the primary book of two books of Busthanul Arifin about the transformation of Islamic law and Institutional Islamic Law.

This dissertation research found that Busthanul Arifin succeeded in straightening the perception of Muslims about the concept of Islamic law into a codified positive law, namely the



Compilation of Islamic Law, made as a material law in the Religious Court, as well as eliminating such misunderstandings sharp in society and legal experts who have not fully accepted Islamic law and the existence of the Religious Courts in Indonesia.

The ideas, efforts, and hard work of Busthanul Arifin in the institutionalization of Islamic law in Indonesia are prospective. Islamic law is oriented towards the establishment of national law. Islamic law is positioned as the main legal source in the formation of national law.

Three legal milestones must be actualized: (1) The substance of Islamic law, namely the verses of the Qur'an and the Hadith of the Prophet concerning the law of *ijtihadi*; (2) Islamic legal institutions as executors of judicial power are Religious Courts; and (3) Public legal awareness of Islamic law. The nature of Islamic law institutionalization is to make Islamic law shift from abstract law to a law that lives concretely, in the sense of being transformed into a living law by appealing to historical, sociological, juridical, and philosophical values.

On the basis of the findings of this dissertation research, the author recommends the need for “repositivization of Islamic law” in Indonesia. Why? Because, the majority of Indonesia’s population are Muslim. The first precepts of Pancasila, that is Belief in the One Supreme, guarantee the Muslim population to live their religious laws. And this is very relevant to the theories of formation and law enforcement in a state that its philosophy is Pancasila and based on the Constitution of the Republic of Indonesia 1945. The Compilation of Islamic Law is a material law of the Religious Courts which is now the status of the Presidential Instruction, it is necessary to immediately be upgraded into Law and entered into Government Gazette and since the Religious Courts have implemented the Compilation of Islamic Law through the First Tribunal in all parts of Indonesia, and has made articles of the Compilation of Islamic Law as the legal basis to adjudicate in the case of *ahwal al-sakhshiyah*.





التلخيص

هاردينال (2018) : تنظيم الشريعة الإسلامية في إندونيسيا وتطبيقها في المحكمة الشرعية (دراسة أفكار بستان العارفين)

الشريعة الإسلامية نظام من أنظمة الشريعة في إندونيسيا التي عرف بها الناس منذ دخول الإسلام إلى إندونيسيا في القرن الأول من الهجرة وقبلها جميعها المسلمون الإندونيسيون كما عرف في نظرية *Receptie in Complexu*. وبدأ أذانها من مؤسسة التحكيم التي كانت رائدة المحكمة الدينية في إندونيسيا. وكانت الشريعة الإسلامية عند عهد المملكة الإسلامية نظام الشريعة الحيوية (القانون الوضعي). عندما كانت مملكة ماتارام سيطرت على منطقة جاوى الوسطى وكان الملك سلطان أغونج (1613-1645 م) فساد الإسلام انتشر إلى جميع مناطق إندونيسيا. في هذا العهد تم تنظيم المحكمة الإسلامية (محكمة سيرامي). في عام 1642، شكل "Statuta Batavia"، منها في تنظيم وراثه الإندونيسيين المسلمين يجب أن يستخدموا الشريعة الإسلامية. في عام 1760، شكل "Compendium Freijer" الذي تضمن حكم الزواج وحكم الموارث الإسلامية. وكان معظم مضمونات كتاب المحرر المعمول به في محكمة سمارانج الحكومية عن الحكم الجنائي الإسلامي. واعترفت محكمة سيرامي قضائيا رسميا كمؤسسة المحكمة الحكومية الأولى في التاريخ 1 أغسطس 1882 اعتمادا على *Staatsblad* رقم 153 عام 1882 لمنطقة الجاوى ومدورا، ولكن مكانتها مذبذبة بشبه المحكمة وغير مستقلة. وعند هدم مملكة ماتارام (1674 م) فتنقسم إلى مملكتين وهما يوغياكرتا وسوراكرتا. وبدأ الهولاند أن يتدخل شؤون المملكة. فأزال دورها ووظيفتها. ومنع أداء الشريعة الإسلامية في إندونيسيا. وظهرت نظرية المستقبل وهي أن كفاءة محكمة سيرامي محدودة في مجال الزواج فقط. في عهد استعمار اليابان، اعتبر أن المحكمة الدينية غير محتاجة وكانت مهمة عند تقرب إلى استقلال إندونيسيا. في أول الاستقلال، شكل القسم الديني. فصل وجود المحكمة الدينية وإشرافها على الاهتمام بعد وجود مكتب المحكمة الدينية حتى يكون إدارة محاكم الشريعة الإسلامية. وأعدت محاولة إزالة المحكمة الدينية بعد الاستقلال بتنظيم القانون رقم 19 عام 1948 عن تكوين وسلطات الهيئات القضائية والأدعاء الذي عبر أن ما اعترفت الهيئة القضائية إلا ثلاث وهي محكمة عامة وإدارة دولة ومحكمة عسكرية.

بستان العارفين هو أحد الرجال والأشخاص المهمين الذي اجتهد بكل جهد ونجح أن يظهر وجود المحكمة الدينية والشريعة الإسلامية في إندونيسيا. فكيف كانت أفكاره، لماذا اجتهد في تنظيم الشريعة الإسلامية ورفع منزلة المحكمة الدينية؟ وكيف يكون تطبيق الشريعة الإسلامية في المحكمة الدينية في إندونيسيا؟

أما أغراض هذا البحث فهي إظهار أفكار بستان العارفين وتصويرها وتحليلها ونقدها في تلك المسألة بسبب الاعتبار أنه نجح في تنظيم الشريعة الإسلامية وتأكيد وجود المحكمة الدينية بعد أن سبق بالرحلة الطويلة والمعقدة والتعب من شبه المحكمة الموجودة في رواق المسجد إلى المحكمة الحكومية. وهي فاعل سلطة القضاء في إندونيسيا الذي قام بتقديرات بنفسه.

وتستخدم طريقة البحث النهج القانون المعباري عن أسس الشريعة ومفاهيمها وتعاليمها وقواعدها باستخدام الكتابين الأساسيين لبستان العارفين عن تحويل الشريعة الإسلامية وتنظيمها.

نجح هذا البحث أن يجيد أن بستان العارفين نجح في تصحيح فهم المسلمين (العلماء) عن مفهوم الشريعة الإسلامية لتكون قوانيننا وضعية مدونة وهي مجموعة الشرائع الإسلامية التي تكون قوانيننا مادية في المحكمة الدينية. وكذلك نجح في إزالة سوء الفهم الدقيق حول المجتمع والخبراء القانونيين الذين لم يستعدوا في مقابلة الشريعة الإسلامية والمحكمة الدينية في إندونيسيا بكمال.

إن أفكار بستان العارفين ومحاولاته واجتهاده في تنظيم الشريعة الإسلامية في إندونيسيا محتملة الوقوع. تكون مجموعة الشرائع الإسلامية متجهة إلى تنظيم الشريعة الوطنية. وقامت الشريعة الإسلامية منزلة أساسية في تنظيم الشريعة الوطنية. هناك ثلاثة عماد الشريعة الذي يلزم تحقيقها: (1) مادة الشريعة الإسلامية، يعني آيات قرآنية وأحاديث تتعلق بالحكم الاجتهادي؛ (2) مؤسسة الشريعة الإسلامية كفاعل سلطة القضاء هي محكمة دينية؛ (3) الوعي القانوني لدى المجتمع على الشريعة الإسلامية. وحقيقة تنظيم الشريعة الإسلامية هي أن جعلت الشريعة الإسلامية انتقلت من قانون مجرد إلى قانون حي واقعي. وذلك بمعنى أنها تحولت لتكون قانونا وضعيا (طريقة العيش) باعتماد على القيمة التاريخية والاجتماعية والقانونية والفلسفية.

اعتمادا على الاكتشافات السابقة في هذا البحث، أوصى الباحث بالحاجة إلى "إعادة وضع الشريعة الإسلامية" في إندونيسيا. لماذا، بسبب أن كثرة سكان إندونيسيا مسلمون. وأمانة المبدأ الأول من المبادئ الخمس، وهو إله أحد، يضمن السكان المسلمين لأداء شرائعهم. وهذا مناسب إلى نظريات تكوين القوانين وسننها في دولة كانت فلسفتها المبادئ الخمس واعتمدت على القانون الأساسي للإندونيسيا عام 1945. ومجموعة الشرائع الإسلامية هي قانون مادي للمحكمة الدينية التي تكون الآن منزلتها توجبه رئيس الجمهورية يحتاج إلى ترقية منزلته ليكون قانونا ويدخل إلى ورقة الدولة لأن المحكمة الدينية قد طبق مجموعة الشرائع الإسلامية من خلال المحكمة للمستوى الأول في جميع مناطق إندونيسيا وجعل فصولا منها أساس القوانين للتحكيم في شؤون الأحوال الشخصية.